



19 November 2018
Siaran Pers
Parlemen Nasional

Anggota Parlemen periodu legislatif kelima akhirnya membuat budaya baru mencabut kekebalan anggota parlemen sehingga mereka dapat memenuhi panggilan pengadilan

Pada tanggal 13 November 2018 Anggota Parlemen dari legislatif kelima akhirnya membentuk budaya baru untuk menghapus kekebalan anggota parlemen agar mereka dapat berkolaborasi dengan pengadilan.

Parlemen Nasional mengadakan sidang pleno untuk mempertimbangkan permintaan penghapusan kekebalan yang dibuat oleh Pengadilan Distrik Dili dalam kaitannya dengan MP Mariano Assanami Sabino untuk tampil sebagai saksi dalam kasus partisipasi ekonomi dalam bisnis dan kejahatan pemalsuan dokumen dan permintaan dari Pengadilan Distrik Baucau terkait dengan MP António da Conceição.

Hasil pemungutan suara atas permintaan untuk pencabutan kekebalan anggota parlemen Antonio da Conceição adalah 56 mendukung, 3 menentang dan 1 abstain. Sementara itu, hasil suara untuk anggota parlemen Mariano Assanami Sabino adalah 53 mendukung, 3 menentang dan 4 abstensi dari total 60 anggota parlemen yang hadir.

“Ini adalah langkah penting yang menandai kemajuan positif bagi legislatif kelima karena selama legislatif sebelumnya, terutama legislatif ketiga, proses yang berkaitan dengan pencabutan kekebalan anggota parlemen atau anggota pemerintah menjadi kompleks dan menciptakan kebingungan besar karena interpretasi ambigu dan tidak konsisten,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP mengucapkan selamat kepada Parlemen Nasional atas niat baiknya dan langkah penting ini ke depan karena telah membuka lembaran baru dalam rangka mencabut kekebalan anggota parlemen agar mereka dapat bekerja sama dengan pengadilan. Secara khusus, JSMP ingin mengucapkan selamat kepada dua anggota parlemen dari Partai Demokrat (PD) atas kesadaran hati nurani politik mereka dalam meminta Parlemen Nasional untuk menghapus kekebalan mereka sehingga mereka dapat menanggapi pengadilan.

JSMP percaya bahwa kedua anggota parlemen ini telah menunjukkan pengalaman yang sangat baik dengan menunjukkan tanggung jawab dan keberanian mereka untuk menghadapi keadilan. Sebagai politisi idealnya harus memiliki kualitas ini; kualitas untuk memikul tanggung jawab atas tindakan politik apa pun yang berkaitan dengan menjalankan peran seorang politikus. JSMP percaya bahwa pengadilan adalah tempat yang tepat dan sah untuk menilai dan menegakkan keadilan atas tuduhan-tuduhan ini.

JSMP telah mengamati selama bertahun-tahun bahwa kekebalan telah menjadi hambatan utama bagi pengadilan untuk mempercepat proses pidana yang melibatkan anggota parlemen dan anggota pemerintah yang diduga melakukan kejahatan. Kecenderungan ini terjadi karena interpretasi kekebalan yang tidak jelas, tidak konsisten dan bias sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi dan Aturan Prosedur Parlementer.

Situasi ini terjadi karena ketentuan konstitusi dan hukum telah menciptakan kebingungan dan membuka jalan bagi berbagai interpretasi yang ambigu. Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan dalam berbagai kesempatan yang berbeda bahwa Parlemen Nasional dan kementerian terkait diminta untuk mengembangkan sebuah pedoman interpretasi standar untuk memperjelas bagaimana dan dalam situasi apa anggota parlemen atau anggota pemerintah dapat mengklaim atau menggunakan hak kekebalan mereka.

JSMP meminta Parlemen Nasional sebagai badan yang kompeten untuk mempertimbangkan untuk mencabut kekebalan anggota parlemen atau anggota pemerintah untuk mempertahankan dan melembagakan praktik-praktek yang baik ini di masa depan untuk menghindari halangan dari anggota parlemen atau anggota

lembaga berdaulat lainnya untuk berpartisipasi dalam persidangan ketika pengadilan telah meminta parlemen untuk mencabut kekebalan mereka.

Dalam pernyataannya, anggota parlemen Assanami menyatakan bahwa PD berkeinginan untuk bekerjasama dengan peradilan. Ia menyatakan bahwa kasus ini sudah lama tertunda, yakni sejak 2015, dan persidangan terus ditunda. Oleh karena itu, sebagai Menteri pada waktu itu ia akan memberikan kesaksian kepada pengadilan untuk menghindari orang lain mengarang cerita ke publik tentang kasus ini.

Sementara itu, anggota parlemen Antonio da Conceição menyatakan bahwa kasusnya terjadi pada tahun 2014 di Kecamatan Vemasse, Kotamadya Baucau dalam kaitannya dengan bantuan kemanusiaan untuk lima desa yang terkena dampak kekeringan. Proses ini dimulai dengan anggota parlemen di Parlemen Nasional mengangkat situasi tersebut pada waktu itu dan anggota masyarakat juga mengirim surat kepadanya.

Dia menekankan bahwa sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan dia perlu melakukan intervensi kemanusiaan, bukan intervensi pasar, dan pada saat itu ada beras yang tersedia untuk melakukan intervensi ini. Namun, ia harus menerima penyelidikan dan statusnya sebagai terdakwa sehingga ia meminta Parlemen Nasional untuk mencabut kekebalannya sehingga ia dapat bekerja sama dengan keadilan untuk menyelesaikan kasus ini di hadapan pengadilan.

Sementara itu, Wakil Presiden dari Partai Demokrat, Adriano do Nascimento, menyatakan bahwa Parlemen Nasional mencabut kekebalan dua anggota parlemen ini, yang merupakan pemimpin partai PD, sehingga mereka dapat mematuhi panggilan pengadilan dalam kaitannya dengan beberapa kasus yang terjadi ketika mereka berada di pemerintahan.

Para pemimpin PD ini telah memberi contoh yang baik untuk diikuti oleh partai politik lainnya, karena mereka menganggap bahwa kekebalan tidak ada dalam semua situasi, tetapi ia memiliki batas-batasnya.

JSMP meminta agar praktik ini diperkuat, tetapi juga menyarankan agar anggota parlemen agar kekebalannya dicabut sepenuhnya sampai masalah ini diputuskan

oleh pengadilan sehingga tidak ada implikasi pada proses persidangan di masa depan.

Sebelumnya Pengadilan Distrik Baucau mengajukan permintaan kepada Presiden Parlemen Nasional agar anggota parlemen António da Conceição, yang adalah mantan Menteri Perdagangan dan Industri, untuk memberikan pernyataan dalam sidang pada 14 November 2018 dalam kasus keterlibatan ekonomi di bisnis sebagai terdakwa.

Sementara itu, berkenaan dengan kasus MP Mariano Assanami Sabino, Pengadilan Distrik Dili mengajukan permintaan mengacu pada Kasus No. 0029 / 16.PGCCC untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus partisipasi ekonomi dalam bisnis, dan kejahatan pemalsuan, dokumen atau laporan teknis untuk pasokan sapi perah.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.tl
www.jsmp.tl
Telepon: 3323883